BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Langkah-langkah Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani

Menilik masalah yang dihadapi Yunani seperti yang dijelaskan di BAB III mengenai Krisis Ekonomi yang terjadi di Yunani berhasil memunculkan spekulasi bahwa Yunani akan keluar dari keanggotaan *Eurozone* (Zona Eropa). Akan tetapi, Uni Eropa berhasil menepis spekulasi tersebut dan menyelamatkan Yunani melalui pemberian *bailout* (dana pinjaman) demi mempertahankan eksistensi Yunani dalam keanggotaan *Eurozone* (Zona Eropa). Namun kontribusi Yunani bagi PDB *Eurozone* (Zona Eropa) sebenarnya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 2%. Ketika terjadi pemilihan umum Yunani pada tahun 2010, Uni Eropa tegang menunggu hasil, apakah partai yang pro-Uni Eropa atau partai *euro*-skeptis yang memenangkan suara rakyat, karena perdana menteri Yunani yang terpilih akan sangat menentukan masa depan Yunani dan Uni Eropa. Jadi, seberapa pentingkah Yunani bagi Uni Eropa, sehingga Uni Eropa harus turun tangan untuk mengatasi Krisis Ekonomi Yunani.

Pada dasarnya, hukum Uni Eropa secara eksplisit tidak menyebutkan adanya kewajiban untuk membantu negara anggota yang mengalami permasalahan ekonomi. Beberapa perjanjian Uni Eropa, khususnya Perjanjian *Maastricht* melarang pemberian *bailout* (dana pinjaman) kepada negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa). Bahkan Perjanjian Lisboa mengatur klausa tentang larangan *bailout* (dana pinjaman). Keputusan untuk memberikan bantuan kepada

Yunani adalah keputusan yang kontroversial. *Bailout* (dana pinjaman) dilarang oleh Uni Eropa untuk mencegah negara anggota secara sengaja melanggar aturan yang ditetapkan dalam SGP dan dikhawatirkan *bailout* (dana pinjaman) yang diberikan pada satu negara akan mendorong negara lain untuk mengajukan *bailout* (dana pinjaman). Akan tetapi, ada klausa pengecualian yaitu klausa pada pasal 122 Perjanjian Lisboa yang dapat dijadikan dasar bagi Uni Eropa untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Yunani. Pasal 122 Perjanjian Lisboa mengenai fungsi Uni Eropa menyebutkan bahwa pemberian bantuan ekonomi memungkinkan untuk dilakukan tapi hanya apabila terjadi kondisi luar biasa.

Krisis Ekonomi Yunani dirasa dapat digolongkan sebagai kondisi luar biasa yang diatur oleh klausa ini.

> "Apabila suatu negara anggota dalam kesulitan atau sangat terancam dengan kesulitan yang disebabkan oleh bencana alam atau kejadian luar biasa di luar kendali, Dewan, pada proposal dari Komisi, dapat memberikan, dalam kondisi tertentu, Union bantuan keuangan kepada negara anggota" (Valiante, 2011:45).

Alasan utama Uni Eropa menyelamatkan Yunani adalah karena Krisis Ekonomi Yunani telah berhasil mengancam stabilitas Uni Eropa dan menyebabkan kerentanan pada pemulihan ekonomi Eropa secara keseluruhan setelah terjadinya krisis finansial global pada tahun 2008. Sepanjang terjadinya Krisis Ekonomi Yunani, nilai *euro* terhadap *dolar* terus mengalami depresiasi. Salah satu peranan dari Uni Eropa memberikan bantuan penyelamatan bagi Yunani adalah untuk menghindari efek domino akibat Krisis Ekonomi Yunani ke negara-negara lain anggota *Eurozone* (Zona Eropa), khususnya negara-negara yang sedang berada di posisi ekonomi yang sulit seperti Irlandia, Italia, Portugal,

dan Spanyol. Injeksi *bailout* (dana pinjaman) yang diberikan Uni Eropa tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban Yunani, melainkan juga untuk menahan Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol dari kejatuhan perekonomian. Dengan memberikan *bailout* (dana pinjaman) kepada Yunani akan menjaga likuiditas Yunani, sehingga dapat memberikan waktu kepada Irlandia, Italia, Portugal, dan Spanyol untuk merekapitalisasi perbankan dan memangkas defisit.

Namun dalam hal ini ada beberapa langkah konkrit Uni Eropa untuk menyelamatkan Yunani dari masalah utang dan defisit anggaran serta fiskal sangatlah diperlukan. Karena bila tidak segera dilakukan, akibatnya akan fatal yaitu dapat meruntuhkan kepercayaan para investor kepada Yunani secara khusus dan Uni Eropa secara umum dan hal itu sangat mengancam eksistensi negara dan regional. Uni Eropa memiliki tugas yang cukup berat, dimana pejabat kawasan ini harus bisa meyakinkan pasar atas pemecahan masalah defisit anggaran. Jika gagal mencari solusi atau masalah kian meningkat, pemodal akan semakin bertambah lari ke pasar (negara/kawasan) lain. Kondisi ini dapat menyebabkan tergantikannya posisi Uni Eropa sebagai kawasan dengan iklim usaha yang prospektif. Uni Eropa harus segera menerapkan sejumlah aturan dan menjaga kestabilan instrumen dan lembaga-lembaga mereka agar krisis tidak menyebar ke wilayah lain di dunia.

Melihat dampak buruk yang telah dan yang akan ditimbulkan oleh terjadinya krisis ekonomi Yunani, Uni Eropa tentunya terdorong untuk segera mengatasi krisis ekonomi yang mengancam eksistensi regionalnya tersebut. Hal yang mendorong Uni Eropa adalah:

Adanya kesadaran *(awareness)* dari Uni Eropa akan tanggung jawab moralnya sebagai organisasi regional yang telah menyatukan 28 negara di kawasan benua Eropa dalam satu mata uang tunggal yakni *euro* terkecuali bagi beberapa negara yang belum mau bergabung (negara non zona *euro*). Situasi ini dipahami oleh Uni Eropa, dan lembaga-lembaga keuangan untuk ikut terlibat dalam masalah krisis ekonomi tersebut. Uni Eropa bertanggung jawab bagi negara anggotanya sebagai satu kesatuan.

Apalagi setelah dibentuknya *European Central Bank* (Bank Sentral Eropa) dalam tubuh Uni Eropa yang memiliki tanggung jawab dalam masalah moneter negara zona *euro* serta adanya bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh ECB, IMF dan Uni Eropa melalui *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi), *The European Financial Stability Facility* dan *The Stability and Grow Pact* yang merupakan bentuk program Uni Eropa yang diterapkan untuk perekonomian yunani. Alasan kenapa Uni Eropa dan lembaga lainnya memilih untuk tidak membiarkan Yunani sebagai akar krisis ekonomi zona Eropa bangkrut adalah karena mereka telah terlibat jauh dan banyak lembaga keuangan Eropa turut menggelontorkan dananya. Jika Yunani tidak diselamatkan maka akan terjadi reaksi berantai dan turut meruntuhkan negara-negara lainnya di kawasan.

Uni Eropa tentu tidak ingin kehilangan citra (*image)* sebagai organisasi regional terbaik dunia yang pernah ada khususnya dengan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai misalnya penyatuan mata uang sebagai pertanda *full integration* (integrasi keseluruhan) dan pembentukan Pasar Tunggal Eropa yang di dalamnya diatur penghapusan hambatan-hambatan dalam perdagangan di

antara sesama negara anggota Uni Eropa. Dicermati kebijakannya dalam berbagai hal seperti dalam hal pengambilan keputusan (*decision making*) karena keputusan ini merupakan suara bersama dari semua negara anggota. Untuk itu, Uni Eropa tentu berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi Yunani meskipun itu mungkin dalam waktu yang cukup lama. Namun ada beberapa langkah program yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengatasi krisis ekonomi di Yunani, baik itu berupa kesepakatan yang dilakukan oleh ketiga troika (*European Commision, European Central Bank and International Monetary* Fund) dalam menjalankan programnya (Verney. 2009:77).

4.1.1 *Economic Adjustment Programme*

Pada 9 Mei 2010, pemerintah Yunani, *European Commission* (Komisi Eropa), ECB, dan IMF sepakat untuk melaksanakan *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) sebagai timbal balik atas bantuan ekonomi yang diberikan oleh Negara-negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) dan IMF kepada Yunani, yaitu sebesar 110 milyar *euro* untuk jangka waktu tiga tahun. Pemberlakukan EAP dituang dalam nota kesepahaman, yaitu *Memorandum of Economic and Financial Policies* (Nota Kebijakan Ekonomi dan Keuangan) yang menjelaskan secara detail kebijakan-kebijakan apa saja yang harus diterapkan oleh pemerintah Yunani. Kesepakatan antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam rangka pengetatan anggaran ini memiliki visi untuk mengurangi secara signifikan defisit anggaran Yunani menjadi di bawah 3% dari jumlah PDB pada tahun 2014.

Yunani adalah negara pertama dalam keanggotaan *Eurozone* (Zona Eropa) yang meminta bantuan dan menandatangani nota kesepahaman dengan *European Commission* (Komisi Eropa) dan ECB dalam rangka mencegah kejatuhan perekonomian akibat krisis. Penerapan EAP akan dievaluasi secara periodikal oleh Uni Eropa dan Uni Eropa berhak memberikan rekomendasi reformasi struktural kepada pemerintah Yunani. *European Commission* (Komisi Eropa) dan ECB akan bertanggungjawab secara penuh untuk mengawasi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam *memorandum*.

Bantuan ini diklaim oleh Uni Eropa bukan sebagai *bailout* (dana pinjaman) langsung, melainkan merupakan mekanisme pendanaan yang dapat menjadi pengaman ketika kondisi perekonomian Yunani memburuk. Setiap negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) memberikan kontribusinya pada paket pinjaman yang diberikan kepada Yunani berdasarkan rasio kontribusi tiap negara untuk ECB. Suku bunga dari pinjaman yang diberikan Uni Eropa sebesar 5% lebih rendah dari bunga yang diberikan pinjaman bank swasta. Program bantuan ini dapat dikatakan sebagai bentuk dominasi atau pengaruh Uni Eropa sebagai institusi neoliberal yang mendesak Yunani untuk menerima dan memprioritaskan bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa, karena mengingat Yunani adalah anggota Uni Eropa dan Uni Eropa telah berusaha memberikan kemudahan bagi Yunani untuk menyelesaikan krisis yang tengah terjadi.

Di dalam tabel di bawah ini dijelaskan pengalokasian dana pinjaman (*bailout*) yang diterima Yunani sebesar 110 miliar *Euro* yang diberikan pada bulan Mei 2010 sampai Juni 2013 dengan rincian dana sebagai berikut:

Tabel 4.1
Mekanisme Distribusi Bantuan *Bailout* dari Uni Eropa untuk Yunani

	Periode	**Jumlah (dalam Miliar *Euro*)**
1	Mei 2010	44,5
2	September 2010	6,5
3	Januari 2011	6,5
4	Maret 2011	10,9
5	Juni 2011	8,7
6	September 2011	5,8
7	Desember 2011	3,6
8	Maret 2012	7,3
9	Juni 2012	4,4
10	September 2012	4,4
11	Desember 2012	1,5
12	Maret 2013	4,4
13	Juni 2013	1,5
	TOTAL	**110 Miliar *Euro***

Sumber: *Eurostat*

Tabel 4.2
Kontribusi 15 Negara Anggota *Eurozone* dalam Paket *Bailout* Yunani

Negara	**ECB *Paid Capital Key***	**Besar Kontribusi (dalam miliar *Euro*)**
Austria	2,86	2,290
Belgia	3,58	2,861
Belanda	5,88	5,704
Cyprus	0,20	0,161
Finlandia	1,85	1,479
IMF	-	30
Irlandia	1,64	1,310
Italia	18,42	14,739
Jerman	27,92	22,336
Luksemburg	0,26	0,206
Malta	0,09	0,075
Perancis	20,97	16,774
Portugal	2,58	2,065
Slovakia	1,02	0,818
Slovenia	0,48	0,388
Spanyol	12,24	9,794
TOTAL	**100%**	**110 Miliar *Euro***

Sumber: *European Commission*

Uni Eropa meminta Yunani untuk menyetujui *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) yang akan ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai timbal balik atas pinjaman yang diberikan. Artinya, bagi Yunani, bantuan ini membuat Yunani harus rela anggaran nasionalnya diawasi oleh Uni Eropa, kebijakan penghematan yang dilakukan harus dinilai oleh Uni Eropa, dan sangat memungkinkan bagi Uni Eropa untuk mendesak perubahan struktural pada perekonomian Yunani. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Yunani harus rela perekonomiannya diintervensi oleh Uni Eropa. Pada 18 Mei 2010, pemerintah Yunani menerima pinjaman 44,5 milyar *euro* sebagai mekanisme pertama dari pinjaman 110 milyar *euro* untuk membayar hutangnya yang akan jatuh tempo.

Satu minggu setelah Uni Eropa menyetujui pemberian *bailout* (dana pinjaman) kepada Yunani, ECB melunucrkan *Securities Market Program* (Program Pasar Keamanan), yaitu kebijakan untuk membeli surat hutang publik dan privat dari negara-negara bermasalah, termasuk Yunani untuk mengatasi memburuknya krisis hutang. ECB membeli 74 milyar *euro* obligasi, dimana 55%-nya adalah obligasi Yunani. Selain itu, menteri-menteri keuangan negara anggota sepakat untuk membentuk mekanisme penyelamatan komprehensif untuk melindungi stabilitas finansial Eropa. Akhirnya terbentuk *European Financial Stabilisation Mechanism* (EFSM) dan Fasilitas Stabilisasi Keuangan Eropa (*European Financial Stability Facility*/EFSF), dengan total bantuan yang disediakan 750 milyar *euro*, 500 milyar dari Uni Eropa dan 250 milyar dari IMF. Uni Eropa juga berencana merevisi SGP dengan pendekatan makroekonomi baru

namun dengan ketentuan fiskal yang lebih ketat lagi dan sanksi yang lebih berat lagi. Dalam mekanisme bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa untuk Yunani ini, terlihat jelas bagaimana Uni Eropa berusaha mewujudkan kepentingannya dalam membantu Yunani menyelesaikan krisis, dan membuat Yunani tunduk, khususnya secara ekonomi, kepada Uni Eropa. Bantuan yang diberikan membuat *bargaining position* (posisi tawar-menawar) Uni Eropa menjadi lebih tinggi.

4.1.1.1 Penerapan *Economic Adjustment Programme* dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani

Sebagai balasan atas pemberian bantuan *bailout* (dana pinjaman), Uni Eropa mengharapkan pemerintah Yunani mengambil beberapa kebijakan penghematan atau *austerity measures* untuk mengurangi defisit dan menghindari kebangkrutan. Sebelum Uni Eropa memberikan bantuan *bailout* (dana pinjaman) kepada Yunani, pemerintah Yunani telah mengambil beberapa kebijakan penghematan untuk mengurangi tingkat defisit menjadi 5% melalui mengurangi pengeluaran publik sebesar 9 milyar *euro* dan menambahkan pendapatan sebesar 4 milyar *euro*. Menurut Uni Eropa, kebijakan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani harus ditingkatkan lagi untuk mendukung alokasi dana pinjaman yang diberikan oleh Uni Eropa untuk pemulihan ekonomi Yunani. Secara spesifik, kebijakan *austerity* (pengetatan) yang dilakukan di tahun 2010 adalah kombinasi dari kenaikan pajak tidak langsung, pengenalan pajak langsung yang baru, reformasi pajak pendapatan personal, pemotongan upah pegawai sektor publik dan dana pensiun, yang kemudian di tahun-tahun berikutnya akan

diikuti dengan pembekuan fiskal yang memengaruhi bantuan sosial dan layanan publik.

Perangkat kebijakan penghematan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Yunani terintegrasi dalam *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi). Secara garis besar, *Economic Adjustment Programme* yang dilakukan memiliki dua tujuan, yaitu untuk memulihkan sustainabilitas keadaan fiskal Yunani dan meningkatkan daya saing dari perekonomian Yunani. Program yang akan dilaksanakan dibuat secara struktural untuk menciptakan perubahan yang drastis namun bertahap. Tujuan utama dari *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) adalah untuk mengoreksi ketidakseimbangan fiskal dan mengembalikan kepercayaan pasar. Untuk mendorong perekonomian, dibutuhkan *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mampu memperbaiki ketidakseimbangan fiskal, mengurangi hutang dalam jangka waktu menengah, menjaga stabilitas sektor perbankan, dan mengembalikan daya saing. Pertumbuhan mungkin tidak akan muncul pada awal kebijakan diimplementasikan, namun dengan adanya kebijakan yang kuat dan berkelanjutan ini, diharapkan perekonomian akan terbentuk lebih baik dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan program ini dan mencapai tujuan, segala elemen kebijakan fiskal, finansial, dan struktural akan digunakan**.**

1. Program Reformasi Kebijakan Fiskal

Perspektif neoliberalisme sangat pro kepada prinsip efisiensi. Sebagai instrumen neoliberal, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemberlakuan EAP (*Economic Adjustment Programme*/Program Penghematan Ekonomi), maka hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Yunani dan Uni Eropa adalah mereformasi kebijakan fiskal. Strategi fiskal difokuskan untuk mengurangi defisit hingga tahun 2013 dan menjaga defisit pemerintah untuk tetap berada di bawah 3% pada tahun 2014 dan seterusnya. Pengaturan pemasukan dan jaminan sosial perlu menjadi penopang dari langkah untuk memperbaiki fiskal dan merestorasi daya saing. Mereset ulang pemasukan ke level *sustainable* (bekelanjutan) diperlukan untuk membantu perbaikan fiskal, mengurangi inflasi sehingga berada di bawah rata-rata *Eurozone* (Zona Eropa), dan mendorong harga dan nilai daya saing. Program jaminan sosial perlu diperkuat untuk menghadapi ketidakseimbangan struktural yang ada sebagai hasil dari semakin menuanya populasi.

Program ini menargetkan naiknya pemasukan sebesar 4% dari PDB pada tahun 2013. Pemasukan yang berasal dari lapisan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi akan ditarik dari kenaikan pajak profesi, pajak barang mewah, dan biaya tambahan pada properti bernilai tinggi dan menguntungkan. Pemasukan lainnya akan ditarik dari kenaikan pajak nilai tambah dan pajak-pajak lainnya yang umumnya nilainya lebih rendah di bawah rata-rata *Eurozone* (Zona Eropa). Pajak untuk konsumsi alkohol dan rokok juga akan menjadi bagian penting dari langkah-langkah menaikkan pemasukan.

Di samping mengambil kebijakan fiskal langsung, pemerintah juga menginisiasikan seperangkat reformasi fiskal struktural. Reformasi ini bertujuan untuk mendorong sustainabilitas melalui pengetatan kontrol atas pemasukkan dan pengeluaran. Reformasi yang dilakukan adalah melakukan reformasi sistem pensiun. Dana-dana pensiun yang sebelumnya terdiri atas banyak varian akhirnya digabungkan dan hanya ada tiga jenis dana pensiun. Selain itu, batas usia pensiun dinaikkan menjadi 65 tahun. Reformasi sistem pensiun juga tidak mengizinkan pensiun dini, sehingga apabila seorang pekerja ingin mengklaim dana pensiun, pekerja tersebut harus pensiun di usia 65 tahun. Reformasi dana pensiun ini penting dilakukan mengingat pemborosan pengeluaran sektor publik salah satunya dipengaruhi oleh dana pensiun.

Reformasi yang dilakukan adalah reformasi sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan, pembukuan anggaran di rumah sakit akan lebih dikontrol, *audit* pembukuan akan dipublikasikan secara reguler, dan akan adanya perbaikan mekanisme penetapan harga dan biaya. Segala hal yang berkaitan dengan aktivitas kesehatan akan digabungkan wewenangnya di bawah satu kementerian. Reformasi ketiga yang akan dilakukan adalah reformasi pajak. Selain menaikkan biaya pajak, pemerintah mengetatkan peraturan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dan membuat sistem pajak lebih efisien.

Kebijakan fiskal pertama yang diubah pemerintah Yunani adalah kebijakan menaikkan pajak. Pajak nilai tambah dinaikkan dengan target paling tidak mendapatkan 1800 juta *euro* dalam jangka waktu satu tahun dari pendapatan atas kenaikan pajak ini, pajak nilai tambah yang tadinya 19% dinaikkan menjadi 23%,

yang tadinya 11% dinaikkan menjadi 13%, dan yang tadinya 5,5% dinaikkan menjadi 6,5%. Selain itu, pajak bahan bakar, tembakau, dan alkohol juga dinaikkan sebesar 33% dengan target mendapatkan 1050 juta *euro* dalam jangka waktu satu tahun. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi juga dikenakan pajak tambahan dengan target mendapatkan 600 juta *euro*. Pajak *real estate* (benda tak bergerak) juga dinaikkan dengan target untuk mendapatkan 400 juta *euro*. Pajak barang mewah dinaikkan dengan target mendapatkan 100 juta *euro*. Pemerintah juga memberlakukan pajak-pajak baru, yaitu pajak profesi dengan target mendapatkan 400 juta *euro*, pajak emisi yang diberlakukan tahun 2011 dengan target mendapatkan 300 juta *euro*, pajak lisensi *game* (permainan) dengan target mendapatkan 500 juta *euro* dari lisensi penjualan dan 200 *euro* dari royalti tahunan, serta pajak hak guna tanah dengan target mendapatkan 500 juta *euro*. Pada tahun 2011, minuman non-alkohol juga dikenakan pajak tambahan dengan target untuk menambah pendapatan 300 juta *euro* (Alogoskoufis, 2012:45).

Selain menaikkan pajak, pemerintah juga mengurangi upah pegawai negeri melalui pengurangan bonus dan tunjangan hari raya dan libur, seperti Paskah, Natal, dan libur musim panas, dengan target menghemat 1,5 milyar *euro* dalam jangka waktu satu tahun. Selanjutnya pemerintah mengurangi upah pegawai sektor publik dengan mereduksi kurang lebih 50% dan mereduksi upah lembur sebesar 20% untuk menargetkan penghematan upah pegawai sektor publik sebesar 770 juta *euro* untuk tahun 2011, 600 juta *euro* untuk tahun 2012, 306 juta *euro* untuk tahun 2014, dan 71 juta *euro* untuk tahun 2015. Penghilangan bonus hari raya yang diberikan kepada pensiunan juga dilakukan untuk menghemat 1900 juta

euro. Dana pensiun sendiri pun dikurangi untuk menghemat 500 juta *euro*. Pengurangan anggaran sosial dari cadangan yang ada ditargetkan untuk menghemat 700 juta *euro*, lalu anggaran sosial untuk tunjangan solidaritas juga dikurangi untuk menghemat 400 juta *euro* (Kaplanoglou & Rapanos, 2011:21).

2. Program Reformasi Kebijakan Sektor Finansial

Tantangan yang harus segera dihadapi perbankan Yunani adalah memanajemen kondisi likuiditas ketat yang tengah terjadi dengan baik. Sejak akhir tahun 2009, perbankan Yunani telah kehilangan akses untuk beroperasi mendapatkan dana di pasar modal, sehingga banyak bank Yunani yang mengandalkan kredit *Eurosystem* (Sistem Eropa) untuk tetap beroperasi. Untuk mengantisipasi menurunnya *profit bank* (keuntungan bank) yang dapat berdampak pada posisi ekuitas bank, pemerintah Yunani memutuskan untuk mendirikan badan independen *Financial Stability Fund* (Dana Stabilitas Keuangan) dibawah koordinasi langsung dengan Troika. Tujuan utama didirikannya *Financial Stability Fund* (Dana Stabilitas Keuangan) adalah untuk menjamin kesejahteraan perbankan sehingga memiliki kapasitas untuk mendukung perekonomian Yunani melalu penyediaan ekuitas yang dibutuhkan oleh bank.

3. Program Reformasi Kebijakan Struktural

Ada beberapa strategi reformasi kebijakan struktural yang akan diambil, yaitu memodernisasi administrasi publik, memperkuat pasar tenaga kerja dan kebijakan pendapatan, memperbaiki lingkungan bisnis dan mendorong pasar yang

kompetitif, serta memanajemen ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk memodernisasikan administrasi publik, pemerintah Yunani akan mengatur kembali prosedur perekrutan tenaga kerja dan memfinalisasi keberadaan otoritas tunggal untuk mengatur upah tenaga kerja. Sistem pemberian upah yang telah disimplifikasi akan diciptakan yang bertujuan untuk menghemat biaya. Sistem layanan kesehatan yang paling banyak melakukan pemborosan pengeluaran akan direformasi, baik dalam hal sistem manajemen, pembukuan, dan pembiayaan. Sistem pemerintahan akan diatur ulang untuk mengurangi jumlah birokrat dan mengurangi praktik korupsi. Untuk memperkuat pasar tenaga kerja, selain mengurangi upah tenaga kerja, pemerintah juga merevisi peraturan perlindungan tenaga kerja, seperti meningkatan masa *probation* (percobaan), menyesuaikan kembali peraturan yang mengatur pemecatan masal, dan memfasilitasi fungsi dari kerja paruh waktu. Untuk memperbaiki lingkungan bisnis, pemerintah akan mengadopsi aturan pendirian badan yang beroperasi secara komprehensif untuk mengatur pendirian usaha baru.

Hal ini bertujuan untuk memangkas prosedur, biaya, dan penundaan pendirian usaha baru. Jaringan industri akan diliberalisasi, khususnya pada sektor transportasi dan energi. Untuk memanajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah akan mengadopsi aturan untuk memublikasikan secara umum pernyataan finansial yang sudah diaudit dari sepuluh badan usaha yang mengalami kerugian terbesar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sehingga mengurangi kerugian lebih banyak lagi.

4.1.2 *The European Financial Stability Facility*

Pada KTT zona *euro* yang diselenggarakan pada 26 Oktober 2011, Kepala Negara zona *euro* atau Pemerintah menyetujui program bantuan keuangan kedua untuk Yunani. Rincian Program ini disetujui oleh *Eurogroup* pada tanggal 21 Februari 2012. Tawaran publik untuk PSI diluncurkan oleh Republik *Hellenic* pada 24 Februari dan ditutup pada 8 Maret. Pada 9 Maret, diumumkan bahwa pemegang obligasi memegang 85.8% dari hukum obligasi, Yunani setuju untuk pertukaran obligasi. Pada pengaktifan *Collevtive Action Clauses* untuk menaik tingkat partisipasi 95,7%. Hal ini menghasilkan penurunan nilai nominal dalam utang Yunani oleh investor swasta menjadi 53,5%, hal tersebut sesuai dengan pengurangan stok utang untuk Yunani sekitar € 107 Miliar. Tujuannya adalah untuk mengamankan penurunan utang Yunani terhadap PDB dengan tujuan mencapai 120% pada tahun 2020. Karena tingkat dari utang Yunani diperkirakan akan jatuh di bawah 120% dari PDB pada tahun 2020, mencapai 117%.

Program kedua Yunani dipertimbangkan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan Yunani sampai akhir 2014 dan itu termasuk kontribusi yang belum dicairkan dari Fasilitas Pinjaman Yunani. EFSF harus menyediakan jumlah tersebut dikurangi kontribusi IMF. Program kedua memiliki komponen rekapitalisasi perbankan hingga € 48 miliar.

Unsur-unsur lain yang memerlukan pembiayaan oleh EFSF adalah:

1. Kontribusi *Private Sector Initiative* (PSI) sebagai bagian dari pertukaran utang sukarela, Yunani menawarkan investor obligasi EFSF (1 sampai 2 tahun). Obligasi EFSF ini, diberikan kepada pemegang obligasi di bawah

hukum Yunani, selanjutnya akan diperpanjang dalam jangka waktu yang lebih lama. Jatuh tempo untuk *refinancing* akan diputuskan sesuai dengan permintaan pasar dan dalam rangka untuk memastikan EFSF. Setelah penawaran pertukaran utang juga telah diselesaikan Yunani, obligasi yang dikeluarkan di bawah hukum asing, korporasi dan pemerintah Yunani, dijamin oleh negara Yunani, jumlah kontribusi PSI bisa meningkat menjadi total € 30 miliar.

2. Bunga yang masih harus dibayar memungkinkan Yunani untuk memberikan investor EFSF tagihan 6 bulan. Tagihan kemudian akan berlanjut ke jangka waktu yang lebih lama untuk memastikan operasi pasar yang baik. Setelah penawaran pertukaran utang telah selesai. Kemudian obligasi Yunani, yang dikeluarkan di bawah hukum asing, dan korporasi dan Yunani, yang dijamin oleh pemerintah Yunani, jumlah bunga dapat meningkat hingga € 5,5 miliar.
3. *Buy-Back Eurosystem* memungkinkan Yunani untuk membiayai tawaran pembelian kembali, dimana Yunani yang bertindak melalui ECB sebagai agennya, menawarkan untuk membeli kembali dari *Eurosystem*. *National Centra Bank* (NCBs) menerbitkan obligasi yang dijamin oleh Yunani dan diselenggarakan oleh NCBs sebagai jaminan untuk operasi kebijakan moneter *Eurosystem* dalam hal *default counterparty* kebijakan moneter. Penawaran *buy*-back untuk periode yang dimulai pada tanggal dimana satu atau lebih dari masing-masing tiga lembaga pemeringkat kredit utama, sebagai hasil dari pertukaran utang. Tujuan dari *buy-back* menawarkan skema untuk memungkinkan kelayakan obligasi yang diterbitkan atau dijamin oleh Yunani

sebagai jaminan untuk operasi kebijakan moneter *Eurosystem* dalam konteks ini. Yunani menerima obligasi EFSF 1 tahun untuk operasi ini dan, jika tidak digunakan untuk *buy-back*, EFSF akan membatalkan peminjaman tersebut.

4. Peminjaman sebesar € 35 miliar untuk *buy-back Eurosystem* berada di atas paket baru Yunani.

EFSF akan menggunakan, strategi pendanaan diversifikasi fleksibel untuk memastikan bahwa jumlah yang akan didanai tersebar di seluruh program. Ini juga berarti bahwa EFSF akan dapat mengambil keuntungan dari kondisi pasar. Kontribusi *Private Sector Initiative* (PSI), bunga dan pinjaman program (tidak termasuk jumlah yang dialokasikan untuk rekapitalisasi bank) yang dibiayai melalui pasar. Jaminan tambahan untuk *Eurosystem* adalah operasi *cashless*. Ini juga diharapkan menjadi kasus untuk rekapitalisasi bank-bank Yunani yang telah dibiayai oleh penyediaan obligasi EFSF.

Program Pertama Yunani telah dihentikan. Sisanya akan disumbangkan oleh kawasan *euro* (€ 24,4 miliar) yang sekarang akan disalurkan oleh EFSF. Dana € 10 miliar dari IMF dari program pertama Yunani telah dialihkan ke program baru Yunani. Setelah penilaian oleh Komisi Eropa, ECB dan IMF bahwa Yunani dalam cara menerapkan semua kebijakan reformasi yang telah disepakati sebelumnya. *Eurogroup* resmi menyetujui pencairan kedua di bawah program penyesuaian ekonomi kedua untuk Yunani.

Eurogroup mencatat bahwa prospek keberlanjutan utang pemerintah Yunani telah memburuk dibandingkan Maret 2012 saat program kedua disimpulkan, terutama karena situasi makro-ekonomi memburuk dan keterlambatan dalam

pelaksanaan program. Oleh karena itu, Eurogroup menyetujui serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk meringankan beban utang Yunani dan membawa utang publik kembali pada jalur yang berkelanjutan, sehingga tingkat utang terhadap PDB dari 124% dapat dicapai di tahun 2020 langkah-langkah ini meliputi:

1. Penurunan Fasilitas Pinjaman Yunani (*Greek Loan Facility*/GLF) menurunkan sebesar 100 poin dari suku bunga yang dikenakan Yunani pada pinjaman yang diberikan di bawah (Negara Anggota GLF di bawah Program Bantuan Keuangan tidak diperlukan untuk berpartisipasi dalam penurunan suku bunga GLF untuk periode dimana mereka menerima bantuan keuangan sendiri). Langkah ini diperkirakan menurunkan kebutuhan pembiayaan negara dengan € 19 miliar pada tahun 2016.
2. Pembatalan biaya komitmen jaminan EFSF (bersyarat pada pelaksanaan lanjutan dari reformasi Yunani): Pembatalan dari biaya komitmen jaminan, sebesar 10 poin, yang dibayar oleh Yunani pada pinjaman EFSF. Langkah ini diperkirakan menyimpan total € 27 miliar selama seluruh periode pinjaman EFSF ke Yunani.
3. Ekstensi GLF dan EFSF: Meskipun waktu pinjaman EFSF jangka panjang, hal ini masih bisa menghambat kembalinya untuk pembiayaan pasar. Perpanjangan jangka waktu pinjaman GLF dan EFSF per 15 tahun tidak berdampak pada pengurangan utang pada tahun 2020 atau lebih, tetapi secara signifikan meningkatkan profil utang negara dan meningkatkan kondisi untuk kembali ke pembiayaan pasar.

4. Penundaan pembayaran bunga EFSF merupakan penangguhan pembayaran bunga pinjaman selama 10 tahun dan memungkinkan Yunani untuk mengurangi secara substansial kebutuhan pembiayaan. Operasi ini tidak akan membuat biaya tambahan untuk EFSF sejak Yunani harus membayar beban bunga atas bunga yang ditangguhkan. Langkah ini diperkirakan menurunkan kebutuhan pembiayaan negara dengan total € 12,9 miliar pada tahun 2016.
5. Penghasilan *Securities Market Programme* (SMP) merupakan Sebuah komitmen negara-negara anggota untuk menyampaikan kepada Yunani rekening jumlah yang setara dengan pendapatan Pasar yang merupakan Program ECB. Bank Sentral Eropa sejak tahun 2013 (Negara Anggota di bawah Program bantuan keuangan tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam skema ini untuk periode di mana mereka menerima bantuan keuangan sendiri).

Eurogroup juga menekankan bahwa manfaat dari langkah-langkah yang disebutkan di atas akan bertambah ke Yunani secara bertahap dan kondisional pada pelaksanaan lanjutan dari reformasi yang telah disepakati. Persetujuan akhir untuk langkah-langkah di atas itu bersyarat atas keberhasilan operasi utang *buy-back* yang dilakukan oleh pemerintah Yunani. *Buy-back* diterapkan pada obligasi baru Yunani yang diterbitkan dalam konteks *Private Sector Initiative* (PSI) yang dimulai Maret 2012. Hal itu dilakukan melalui operasi tender terbuka untuk semua pelaku pasar. Utang *buy-back* (diumumkan oleh Departemen Keuangan Yunani pada tanggal 3 Desember dan selesai pada tanggal 11 Desember 2012) untuk mengurangi jumlah utang nominal negara sekitar € 21 miliar.

EFSF menyediakan pinjaman, dalam amplop dari program bantuan keuangan kedua untuk Yunani, untuk membiayai operasi *buy-back*. Untuk tujuan ini, EFSF menerbitkan wesel enam bulan untuk jumlah nominal € 11,3 miliar, yang dipindahkan ke pemerintah Yunani pada tanggal 19 Desember 2012. EFSF akan menyediakan dana kepada pemerintah Yunani untuk *Hellenic Financial Stability Fund* (HFSF) membiayai rekapitalisasi dan resolusi biaya bank yang dipilih. Selain itu, EFSF akan menyediakan dana kepada pemerintah Yunani untuk kebutuhan pembiayaan anggaran. Tidak termasuk dalam konteks yang menyangkut catatan EFSF dalam hal rekapitalisasi bank, tidak ada pembatasan pengalihan khusus atas pemegang catatan yang sesuai umumnya berlaku untuk syarat dan kondisi dari *notes* yang telah diterbitkan di bawah Program EFSF tentang Emisi Hutang.

4.1.2.1 Penerapan *The European Financial Stability Facility* dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani

Pada tanggal 14 Maret 2012, Menteri Keuangan zona *euro* menyetujui pembiayaan *Second Economic Adjustment Programme* untuk Yunani. Menteri Keuangan anggota Negara zona *euro* dan IMF berkomitmen jumlah yang belum dicairkan dari program pertama *Greek Loan Facility* (GLK/Fasilitas Pinjaman Yunani) plus tambahan € 130 miliar untuk tahun 2012-14. Sedangkan pembiayaan program pertama didasarkan pada pinjaman bilateral, disepakati bahwa di samping anggota Negara zona *euro* program kedua akan dibiayai oleh Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa atau *The European Financial Stability Facility* (EFSF),

yang telah beroperasi penuh sejak Agustus 2010. Secara total, bantuan dana program kedua yang dikeluarkan sekitar €164,5 miliar sampai akhir 2014. Dari jumlah ini, komitmen zona *euro* memberikan bantuan sebesar €144,7 miliar yang akan diberikan melalui EFSF, sedangkan IMF memberikan kontribusi sebesar €19,8 miliar. Selain itu, ketika meluncurkan program kedua yang telah disepakati bahwa harus ada keterlibatan *Private Sector Initiative* (PSI) untuk meningkatkan keberlanjutan utang Yunani. Partisipasi yang tinggi membuat kontribusi yang signifikan terhadap tujuan ini untuk menawarkan pertukaran utang Yunani di musim semi 2012. Dari total €205,6 miliar obligasi berhak menerima penawaran pertukaran, sekitar €197 miliar, atau 95,7% yang telah ditukar. Pembebasan pencairan bantuan keuangan didasarkan pada ketaatan kriteria kinerja kuantitatif dan evaluasi positif dari kemajuan yang dibuat sehubungan dengan kriteria kebijakan yang rinci dalam Keputusan Dewan 2011/734/Uni Eropa 12 Juli 2011 (sebagaimana yang telah diubah pada November 2011, 13 Maret dan 4 Desember 2012) dan menetapkan *Memorandum of Understanding The Economic Policy Conditionally* yang ditandatangani pada 7 Desember 2012 (http://ec.europa.eu/ economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/_efsfdiakses pada 20 Juli 2014).

Pada musim semi 2012, ketidakstabilan politik terus menyebabkan pemilu yang menciptakan lingkungan yang sangat tegang, di mana ketidakpastian tentang kemungkinan hasil dari pemilihan kedua menyebabkan percepatan arus keluar modal dan keraguan tentang kemampuan Yunani untuk melaksanakan program penyesuaian. Pada akhirnya, 17 Juni pemilu menghasilkan pembentukan

pemerintah koalisi yang terdiri dari tiga partai politik dengan mandat untuk mengamankan masa depan Yunani di zona *euro*, dan karenanya untuk melaksanakan program penyesuaian ekonomi. Pemerintah baru dan administrasi dengan cepat mengambil tantangan mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penangkapan pada pelaksanaan program. Kesulitan untuk segera memenuhi persyaratan setelah pemilu secara signifikan menunda pencairan tahapan berikutnya dari pemberi pinjaman internasional dan pinjaman sementara ini dibenarkan telah mengambil korban besar dari perekonomian.

Terhadap latar belakang ini, dan mempertimbangkan tindakan yang diambil oleh pemerintah, pada 26-27 November 2012, Menteri keuangan zona *euro* dan IMF setuju untuk memperpanjang jalur penyesuaian fiskal dua tahun, melibatkan pengurangan target surplus primer untuk 2014 dari 4,5% PDB menjadi 1,5% dari PDB dan penyesuaian tahunan bahkan sebesar 1,5% dari PDB sampai surplus primer sebesar 4,5% dari PDB yang dicapai dalam 2016. Mereka juga menyepakati paket kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi utang Yunani menjadi 124% dari PDB pada tahun 2020. Anggota Negara zona *euro* setuju untuk melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

1. Suatu penurunan sebesar 100 bps dari suku bunga yang dikenakan ke Yunani pada pinjaman yang diberikan dalam konteks *Greek Loan Facility* (Fasilitas Pinjaman Yunani).
2. Suatu penurunan sebesar 10 bps dari biaya-biaya jaminan yang dibayarkan oleh Yunani pada pinjaman EFSF.

3. Perpanjangan jangka waktu pinjaman bilateral EFSF 15 tahun dan penundaan pembayaran bunga pinjaman EFSF Yunani hingga 10 tahun.
4. Sebuah komitmen negara-negara anggota untuk menyampaikan kepada *Greece's Segrated Account*, denga jumlah yang setara dengan pendapatan di Pasar Program Securities atau *Securities Market Programme* (SMP) yang diperoleh bank sentral nasional mereka sebagai dari anggaran tahun 2013.

Secara paralel, Yunani diberitahu bahwa mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah tertentu pengurangan utang melalui pembelian lelang utang publik dari berbagai kategori obligasi.

Pada 12 Desember 2012, menyusul setelah finalisasi prosedur nasional yang relevan dan terakhir hasil operasi utang *buy-back* yang dilakukan oleh Yunani, *Eurogroup* menyetujui angsuran kedua di bawah *Second Economic Adjustment Programme* untuk Yunani. Atas dasar itu, negara-negara anggota resmi EFSF berikutnya untuk melepaskan total jumlah angsuran €49,1 miliar. Pencairan akan dilakukan dalam beberapa tahapan. €34,3 miliar telah dibayarkan Yunani pada bulan Desember 2012. Sisanya akan dicairkan pada kuartal pertama dari tahun 2013. Pertama, yang akan dikeluarkan lebih dari €7,2 miliar untuk menutupi rekapitalisasi perbankan dan biaya penyelesaian. Kedua, dana untuk menutupi pembiayaan anggaran akan dikucurkan dalam tiga sub-tahapan, terkait dengan penerapan *Memorandum of Understanding* yang telah disepakati oleh Troika. Tahapan berikutnya sebesar €2,0 miliar, €2,8 miliar dan €2,8 miliar telah dibayar pada 31 Januari 2013, 28 Februari 2013 dan 3 Mei 2013, menyusul dukungan dari

Negara Anggota zona *euro* (http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/_efsfdiakses pada 20 Juli 2014).

Pada 15 April 2013, tim staf dari Komisi Eropa, ECB dan IMF menyimpulkan misi mereka untuk Yunani dalam konteks *review* kedua dari *Second Economic Adjustment Programme*. Misi Staf Pemerintah mencapai kesepakatan terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan yang diperlukan untuk memastikan program tetap di jalur untuk mencapai tujuannya. Pada 13 Mei 2013, *Eurogroup* menyimpulkan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk berada di tempat negara-negara anggota untuk menyelesaikan prosedur nasional yang diperlukan untuk persetujuan angsuran berikutnya, yang akan dicairkan dalam dua sub-tahapan. Setelah selesai prosedur nasional dan implementasi penuh dari tindakan sebelumnya yang relevan, sub-tahapan pertama €4,2 miliar telah disetujui oleh EWG dan EFSF, dan disalurkan pada tanggal 17 Mei 2013. Sub-ahapan kedua sebesar €3,3 miliar disalurkan pada 25 Juni 2013, menyusul persetujuan EWG dan EFSF pada tanggal 13 Juni 2013 mendatang persetujuan ini didasarkan pada rekomendasi yang relevan yang dibuat oleh Komisi Eropa, ECB dan IMF.

Tinjauan ketiga *Second Economic Adjustment Programme* disimpulkan pada 8 Juli 2013, dengan kesepakatan, referendum dengan otoritas Yunani. Pada hari yang sama, *Eurogroup* menyatakan kepuasannya bahwa program ini secara trek luas dan mandat EWG dan EFSF untuk menyetujui angsuran EFSF berikutnya €3,0 miliar yang akan berlangsung dalam dua sub-tahapan. Pada saat yang sama, *Eurogroup* diamanatkan EWG dan EFSF juga menyetujui pencairan sebesar €2.0

miliar, setara dengan pendapatan pada SMP untuk zona *euro* bank sentral nasional, untuk *Greece's Segreated Account*, dengan cara yang sama dalam dua sub-tahapan. Sub-tahapan Pertama €2.5 miliar telah disetujui pada 26 Juli 2013 oleh EWG dan EFSF setelah implementasi dari tindakan sebelumnya; jumlah tersebut dicairkan pada 31 Juli 2013, setelah negara-negara anggota diselesaikan prosedur nasional yang terkait. Sub-tahapan pendapatan €1,5 miliar pada SMP dibayar pada kesempatan yang sama. Sub-tahapan Kedua €0,5 miliar disetujui pada 17 Desember 2013 oleh EWG dan Dewan EFSF setelah implementasi penuh dari semua tonggak yang terkait; pada hari yang sama jumlah ini disalurkan. Demikian pula dengan suba-tahapan sebelumnya, sub-tahap pendapatan €0.5 miliar pada SMP dibayar pada kesempatan yang sama.

4.1.3 *The Stability and Growth Pact*

Merancang *The Stability and Growth Pact* (Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas) atau SGP yang merupakan sebuah perangkat aturan untuk mendukung Anggota Negara untuk mempertahankan suara publik dalam hal finansial. SGP memiliki dua bagian, pertama sebagai Divisi Pencegahan yang akan memberikan peringatan awal untuk pengurangan yang ekstrim. Sedangkan divisi kedua sebagai pengoreksi pemerintah mengenai *Excessive Deficit Procedure* (Prosedur Defisit Berlebihan) yang akan merekomendasikan isu baru mengenai defisit anggaran sebuah negara kepada dewan untuk kemudian memberikan sanksi untuk Negara Anggota tersebut.

The Stability and Growth Pact (Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas) atau SGP memiliki tujuan utama sebagai berikut:

a. Memperbolehkan Divisi Pengoreksi SGP untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam mengatur hal-hal diantara defisit dan hutang, lebih spesifik lagi pada negara-negara dengan jumlah hutang paling tinggi (dimana hutang publiknya mencapai 60% dari jumlah GDP)
b. Mempercepat EDP dan membuat sanksi kepada Negara Anggota yang melanggar persyaratan yang dibuat oleh komisi.
c. Meningkatkan kerangkat target dana nasional, membicarakan perhitungan dan isu statistik sebaik melakukan praktiknya

Untuk terus menjaga stabilitas finansial dalam pengadopsian *euro*, dengan menjadikan *Convergence Criteria* (Kriteria Konvergensi) sebagai dasar, negara-negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) meratifikasi *Stability and Growth Pact* (Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas) sebagai panduan dalam menjaga perekonomian. SGP diciptakan untuk menjadi pedoman pembiayaan publik yang baik, mencegah negara anggota menerapkan kebijakan fiskal yang tidak berkelanjutan, dan mendorong negara anggota untuk disiplin dalam hal penganggaran. Dikarenakan Uni Eropa tidak bisa mengintervensi negara anggota dalam hal kebijakan fiskal, maka SGP dibuat sebagai dasar bagi negara anggota untuk disiplin dalam hal penerapan kebijakan fiskal, sehingga kebijakan moneter yang diciptakan oleh ECB dapat berkoordinasi dengan baik dengan kebijakan fiskal nasional negara-negara anggota. Adanya koordinasi ini diharapkan dapat mengarahkan sekaligus mengontrol keseimbangan anggaran fiskal Negara

anggota. *Stability and Growth Pact* (Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas) atau SGP merupakan satu-satunya pakta yang berfungsi menjembatani antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di *Eurozone* (Zona Eropa). Dengan adanya SGP, dihrapkan kekhawatiran Negara anggota mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal setelah bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa) dapat teratasi. Beberapa negara, termasuk Jerman, khawatir bahwa kebijakan moneter tunggal dan tingkat bunga yang rendah akan berdampak pada ketidakseimbangan fiskal bagi beberapa Negara.

Euro sebagai mata uang tunggal tidak secara otomatis menciptakan stabilitas ekonomi, akan tetapi penggunaan *euro* bertujuan untuk menciptakan stabilitas. Salah satu cara untuk mencapai stabilitas adalah negara-negara anggota harus berpedoman pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam SGP. Dalam hal pembiayaan publik, SGP mengatur beberapa hal, di antaranya adalah membatasi hutang publik sebesar 60% dari jumlah PDB negara dan membatasi jumlah defisit anggaran Negara sebesar -3% dari jumlah PDB negara. Aturan-aturan ini dibuat untuk mendorong manajemen perekonomian yang baik, khususnya untuk menciptakan stabilitas harga, mendorong tingkat inflasi dan suku bunga yang rendah, dan melindungi perekonomian dari ancaman guncangan ekseternal perekonomian global.

Pada tahun 2005, SGP diamandemen agar bersifat lebih fleksibel karena pada awal penerapannya, banyak negara anggota yang melanggar standar batas yang ditetapkan oleh SGP. Pada versi SGP yang telah diamandemen, negara dapat memperpanjang hutangnya apabila mengalami pengurangan defisit, berapapun

tingkat penurunnnya, sedangkan pada versi *original* SGP, negara boleh memperpanjang hutang atau melakukan pinjaman kembali hanya bila terjadi pengurangan defisit setidaknya 2%. Selain itu, bagi negara yang dapat memanajemen hutangnya ke level aman, dapat melakukan pinjaman dalam jumlah lebih besar. Fleksibilitas dari peraturan yang telah diamandemen ini tentunya mendorong negara anggota untuk lebih mudah melakukan pinjaman.

Akan tetapi, SGP terus berusaha beroperasi secara preventif dan korektif. Secara preventif, SGP menciptakan panduan prosedurial untuk menghindari defisit yang berlebih dan langkah-langkah mencapi konsolidasi fiskal melalui perangkat anggaran jangka menengah untuk setiap Negara anggota, sehingga situasi perekonomian negara anggota dan prospeknya dapat tetap berada di margin aman yang ditetapkan dalam SGP. Sanksi yang berlaku bagi negara anggota yang tidak menerapkan mekanisme preventif SGP adalah tekanan-tekanan dari negara-negara anggota lain yang diharapkan dapat mendorong pemerintah nasional untuk disiplin dalam hal menciptakan manajemen anggaran yang berkelanjutan. Secara korektif, SGP menuntut negara-negara anggota untuk segera mengambil langkah korektif apabila defisit dan rasio hutang yang dimiliki melampaui batas yang ditetapkan oleh SGP. Akan tetapi, SGP memberikan pengecualian apabila defisit dan hutang yang dimiliki adalah hasil dari krisis ekonomi yang parah atau peristiwa tidak biasa yang berada di luar batas kontrol dan kemampuan pemerintah nasional (Smallwood, 2009:5).

4.1.3.1 Penerapan *The Stability and Growth Pact* dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani

Kebijakan moneter muncul sebagai kebijakan utama yang di *conduct* oleh ECB untuk mengatur stabilitas harga di kawasan *Eurozone*. Kebijakan moneter ECB menjadi sangat signifikan karena keberadaan *common monetary policy*, yang berarti kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh ECB harus diaplikasikan oleh 18 negara pengguna *Euro* tanpa kecuali. Kebebasan negara-negara *Eurozone* hanya dalam mengatur kebijakan fiskalnya (http://www.ecb.int/ecb/education/facts/orga/ html/or_012.en. html diakses pada 23 Mei 2014).

Penelitian ini melihat bahwa tingginya rasio utang Yunani ini didukung oleh kebijakan moneter ECB dan juga faktor domestik Yunani sendiri. Banyaknya likuiditas yang beredar di pasar keuangan sebagai implikasi dari kebijakan *full allotment* oleh ECB membuat permintaan terhadap likuiditas terus meningkat. Permintaan ini kemudian menghasilkan tingginya keinginan untuk melakukan kredit. Kebijakan tingkat suku bunga yang rendah juga mendorong tingginya keinginan akan kredit, terutama di Yunani. Yang menjadi masalah adalah, kecenderungan akan utang ini tidak dibarengi oleh kemampuan Yunani membayar utang, sebab Yunani seperti *skávontas mia trýpa kapáki* "gali lubang tutup lubang" karena membiayai defisitnya dengan utang. Hal ini disebut juga dengan *twin crisis*. Peminjaman kredit murah terhadap Yunani juga menyalahi SGP yang mengatur tentang tingkat defisit yang harus dipenuhi suatu negara agar diperbolehkan untuk melakukan kredit. Banyak sumber yang berpendapat berbeda dalam hal ini; ada sumber yang mengatakan bahwa Yunani masih memodifikasi

data ekonominya sehingga ECB tidak mengetahui tingkat defisit Yunani yang sesungguhnya, ada pula sumber yang mengatakan bahwa fungsi regulasi dan pengawasan ECB memang lemah dalam hal ini. Terlepas dari fakta manapun yang benar, kebijakan akan kredit murah ini sudah berbahaya karena rentan akan *bubble economy;* alokasi akan kredit tidak jelas akan dialirkan kemana. Selain itu, jaminan yang diberikan atas kredit oleh Yunani juga seharusnya mencerminkan bagaimana kualitas dari keadaan finansial dan ekonomi Yunani.

4.3 Kendala Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani

Selain didorong oleh keinginan kuat untuk segera menyelamatkan perekonomian regional Eropa khususnya perekonomian zona *euro*, Uni Eropa juga menemui berbagai jenis hambatan. Hambatan-hambatan itu dapat berupa dari anggota Negara-negara Eropa sendiri maupun dari peranan Bank Sentral Eropa sebagai institusi perbankan zona *euro*.

A. Pengaruh Jerman dan Perancis sebagai Negara dengan Perekonomian Terbesar di Uni Eropa

Hambatan yang berasal dari dalam tubuh Uni Eropa sendiri, misalnya ketidaksetujuan perwakilan negara-negara besar seperti Jerman, Prancis, Belanda, dan Finlandia atas *bailout* tahap kedua bagi Yunani. Negara-negara ini sepakat pemberian *bailout* tahap kedua ditunda. Bahkan mereka mulai ragu dan tidak mau lagi mendukung Yunani. Negara-negara tersebut menolak memberi bantuan lagi karena warganya merasa membayar pajak, tapi diberikan kepada rakyat negara

lain. Oleh karena itu, Pemerintah Yunani harus mengambil kebijakan penghematan untuk memotong anggaran besar-besaran. Dan tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara lainnya akan mendapatkan hal yang sama (penolakan) jika kembali meminta Uni Eropa memberikan *bailout*.

Di samping untuk menyelamatkan Yunani dan negara periferi lainnya yang memiliki defisit dalam jumlah sangat besar, bantuan dana pinjaman yang diberikan Uni Eropa juga sebenarnya dirancang untuk menyelamatkan institusi-institusi perbankan dari negara-negara kreditur, seperti Jerman dan Perancis. Jerman dan Perancis adalah kreditur terbesar hutang yang dimiliki Yunani dan merupakan negara penting yang paling berpengaruh di *Eurozone* (Zona Eropa). Apabila Yunani tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya, maka sektor perbankan Jerman, Perancis, dan negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) lain yang menjadi kreditur Yunani akan terancam hancur.

Tidak hanya untuk menyelamatkan negara-negara kreditur, pada dasarnya bantuan yang diberikan kepada Yunani oleh Uni Eropa juga bertujuan untuk menyelamatkan *Economic and Monetary Union* (Integrasi Ekonomi dan Moneter) Uni Eropa secara keseluruhan. Apabila Yunani mengalami *default* (kegagalan), maka Yunani tidak akan mampu membayar hutangnya kepada kreditur. Hal ini akan memicu kepanikan di pasar modal dan hilangnya kepercayaan pasar kepada Negara-negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) lain yang memiliki tingkat hutang yang tinggi atau yang memiliki ekonomi lemah. Apabila *investor* berhenti membeli obligasi yang diterbitkan oleh negara-negara tersebut, maka negara-negara tersebut juga akan mengalami *default* (kegagalan) dan tidak akan sanggup

membayar hutangnya, seperti yang dialami Yunani. Akhirnya lahir lingkaran setan finansial dan dapat menyebabkan obligasi seluruh negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) tidak akan laku.

Keputusan untuk memberikan bantuan penyelamatan bagi Yunani juga digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan tingkat solidaritas Uni Eropa. Padahal sebenarnya kebijakan *bailout* (dana pinjaman) yang diambil oleh Uni Eropa banyak didominasi oleh negara-negara besar, seperti Perancis dan Jerman, sedangkan negara-negara kecil menolak. Misalnya, penolakan awal Slovakia untuk berkontribusi memberikan bantuan dengan alasan "terlalu miskin untuk membantu" membuat negara ini mendapat kritik dari Jerman dan negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) yang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan Uni Eropa, kepentingan politik dan ekonomi negara-negara besar seperti Jerman dan Perancis mendominasi. Selain itu, intervensi Uni Eropa dalam menyelamatkan perekonomian Yunani juga didasari alasan untuk menjaga kredibilitas Uni Eropa. Peraturan Uni Eropa tidak mengatur mekanisme bagi anggota yang ingin atau perlu untuk keluar dari *Eurozone* (Zona Eropa) karena telalu tingginya idealisme untuk menciptakan integrasi ekonomi yang solid. Tidak ada jalur dan ketentuan yang jelas apabila Yunani memang harus keluar dari keanggotaan *Eurozone* (Zona Eropa). Selain itu, keluarnya dari *Eurozone* (Zona Eropa) dapat menghancurkan kebanggan Uni Eropa sebagai *Economic and Monetary Union* (Integrasi Ekonomi dan Moneter) terdepan di perekonomian dunia. Keluarnya Yunani dari Uni Eropa juga dapat memicu keluarnya negara lain dari keanggotaan *Eurozone* (Zona

Eropa). Tekanan dari dunia internasional, misalnya dari IMF, *World Bank* (Bank Dunia), Amerika Serikat, dan negara-negara G20, juga memengaruhi mengapa Uni Eropa mengambil tindakan siaga untuk menangani Krisis Ekonomi Yunani. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Uni Eropa selain menyelamatkan Yunani karena kebijakan apapun yang diambil oleh Uni Eropa akan memengaruhi kredibilitas Uni Eropa di mata dunia internasional.

B. Dampak dari Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa di Yunani

Pentingnya keberadaan ECB diikuti oleh tugas dan fungsi krusial dari ECB yaitu menjaga stabilitas finansial di kawasan *Eurozone* (Zona Eropa). Kebijakan moneter muncul sebagai kebijakan utama yang di *conduct* (lakukan) oleh ECB untuk mengatur stabilitas harga di kawasan *Eurozone* (Zona Eropa). Kebijakan moneter ECB menjadi sangat signifikan karena keberadaan *Common Monetary Policy* (Kebijakan Moneter Bersama), yang berarti kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh ECB harus diaplikasikan oleh 18 negara pengguna *euro* tanpa kecuali. Kebebasan negara-negara *Eurozone* (Zona Eropa) hanya dalam mengatur kebijakan fiskalnya. Sistem dalam *Monetary Union* (Integrasi Moneter) di Eropa ini dapat dikatakan cukup kompleks sebab terdapat dua lapisan dalam *monetary union* (integrasi moneter) ini yang sama-sama melibatkan ECB. Ada beberapa unit yang saling terkait satu sama lain dalam operasinya, yang bergerak dibawah payung *legal Statute of ESCB and ECB* dalam *Maastricht Treaty* (Perjanjian *Maastricht*).

Yunani yang bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa) di tahun 2001 merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tingkat pertumbuhan GDP Yunani bahkan hampir selalu melebihi tingkat pertumbuhan kawasan *Eurozone* (Zona Eropa) rata-rata**.** Pada awal bergabungnya Yunani dengan *Eurozone* (Zona Eropa), Yunani menampakkan pertumbuhan GDP yang signifikan. Liberalisasi sektor ekonomi dan tingkat suku bunga yang semakin rendah pasca pengadopsian *euro* membuat permintaan di Yunani semakin meningkat. Produktivitas melesat, modal semakin kuat, imigrasi pun meningkat. Defisit fiskal yang tinggi mencegah jatuhnya utang publik dibawah 95% dari GDP. Yunani memang selalu mengalami defisit sejak pertama kali Yunani memasuki *Eurozone* (Zona Eropa), yang sebenarnya melanggar *Convergence Criteria* (Kriteria Konvergensi) akan ketergabungannya dengan *Eurozone* (Zona Eropa) yang menetapkan defisit tidak boleh melebihi angka 3% dari GDP. Untuk menutupi dan membiayai defisit ini, Yunani mengandalkan utang luar negeri sebagai sumber biaya pembangunan ekonomi. Sejalan dengan defisit Yunani yang selalu berada di atas 3% sejak bergabungnya Yunani dengan *Eurozone* (Zona Eropa), tingkat utang Yunani juga tidak pernah memenuhi kriteria untuk bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa). Tingkat utang Yunani pada tahun 2001 sudah mencapai 101,5%, padahal ketentuan untuk bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa) maksimal tingkat utang hanya sebesar 60% dari GDP. Memang hal ini tidak diketahui pada tahun 2001, sebab Yunani memalsukan data ekonominya untuk dapat bergabung dengan *Eurozone* (Zona Eropa).

Penelitian ini melihat bahwa tingginya rasio utang Yunani ini didukung oleh kebijakan moneter ECB dan juga faktor domestik Yunani sendiri. Banyaknya likuiditas yang beredar di pasar keuangan sebagai implikasi dari kebijakan *full allotment* (penjatahan penuh) oleh ECB membuat permintaan terhadap likuiditas terus meningkat. Permintaan ini kemudian menghasilkan tingginya keinginan untuk melakukan kredit. Kebijakan tingkat suku bunga yang rendah juga mendorong tingginya keinginan akan kredit, terutama di Yunani. Yang menjadi masalah adalah, kecenderungan akan utang ini tidak dibarengi oleh kemampuan Yunani membayar utang, sebab Yunani seperti "gali lubang tutup lubang" karena membiayai defisitnya dengan utang. Hal ini disebut juga dengan *twin crisis* (Krisis yang Sama). Peminjaman kredit murah terhadap Yunani juga menyalahi Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas atau *Stability and Grow Pact* (SGP) yang mengatur tentang tingkat defisit yang harus dipenuhi suatu negara agar diperbolehkan untuk melakukan kredit. Banyak sumber yang berpendapat berbeda dalam hal ini; ada sumber yang mengatakan bahwa Yunani masih memodifikasi data ekonominya sehingga ECB tidak mengetahui tingkat defisit Yunani yang sesungguhnya, ada pula sumber yang mengatakan bahwa fungsi regulasi dan pengawasan ECB memang lemah dalam hal ini. Terlepas dari fakta manapun yang benar, kebijakan akan kredit murah ini sudah berbahaya karena rentan akan *bubble economy* (gelombang ekonomi) alokasi akan kredit tidak jelas akan dialirkan kemana. Selain itu, jaminan yang diberikan atas kredit oleh Yunani juga seharusnya mencerminkan bagaimana kualitas dari keadaan finansial dan ekonomi Yunani.

Selain akibat dari kebijakan moneter ECB, terdapat faktor-faktor domestik yang membuat perekonomian Yunani menjadi terpuruk. Tingginya tingkat utang Yunani yang didominasi oleh utang pemerintah merupakan implikasi dari instabilitas politik domestik di Yunani. Yunani mengalami pergolakan politik antara partai sosialis dan demokrat yang silih berganti memegang tampuk kekuasaan di Yunani sejak tahun 2007, yang membuat kerjasama politik di Yunani sangat rendah dan demonstrasi yang terjadi setiap hari menjadi hal yang wajar. Akibatnya, sistem pemerintahan Yunani dinilai tidak efisien yang mengakibatkan manajemen keuangan negara yang kacau. Tingkat korupsi Yunani yang dinilai melalui *Corruption Perception Index* (Index Persepsi Korupsi) dinilai paling parah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Pengeluaran negara sama besar dengan pendapatan negara, sehingga tidak ada *saving* (penyimpanan) dan biaya untuk membayar utang. Faktor-faktor tersebut membuat Yunani menjadi negara dengan peringkat terendah di *Eurozone* (Zona Eropa).

Pada 20 Oktober 2009, PM George Papakonstantinou membuka fakta kembali bahwa defisit Yunani sebesar 12,8% dari GDP. George Provopoulos, Gubernur Bank Sentral Yunani, menyatakan tingkat defisit ini akan terus meningkat di masa depan terkait proses politik seperti pemilu. Yunani menyatakan tidak lagi dapat membayar utangnya akibat defisit yang terlalu tinggi dan jumlah utang yang terlalu besar. GDP Yunani di tahun 2009 sebesar 235,017 juta *euro,* sedangkan jumlah utang pemerintah mencapai 298,76 juta *euro* atau sebesar 127,1 % dari GDP. Maka, pada akhir tahun 2009 Yunani dinyatakan mengalami krisis utang.

Sebagai *lender of last resort*, ECB memiliki tanggung jawab untuk membereskan masalah ini. Pada April 2010 ECB memberikan *rescue package* (bantuan pinjaman/penyelamatan) sebesar 30 Milyar *Euro* dan disusul pada Mei 2010 dimana ECB dan IMF memberikan *bailout* (bantuan pinjaman) untuk Yunani sebesar 100 Milyar *Euro*. Penanganan ini dinilai lambat oleh banyak ekonom. Memang pada awalnya ECB menolak untuk memberikan bantuan pada Yunani dan meminta Yunani untuk mengatasi krisis ini dengan menurunkan tingkat defisitnya. Menyadari bahwa hal ini tidak mungkin dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Yunani, maka ECB setuju untuk menyalurkan dana bantuan bagi Yunani. Dalam bantuan dana ini, Jerman berkontribusi 27,9%, Prancis 21%, Italia 18,4%, dan negara *Eurozone* (Zona Eropa) lain menyumbang sisanya. Melihat fakta krisis Yunani masih berlangsung hingga tahun 2010, banyak ekonom yang menyimpulkan bahwa aksi ECB dinilai terlambat dan menampakkan keraguan serta ambiguitas dari ECB untuk menyelamatkan Yunani, seakan-akan ECB ragu bahwa utang Yunani bukan merupakan jaminan yang cukup bahwa Yunani pantas untuk menerima bantuan dana. ECB menggunakan rating yang dibuat oleh *American rating Agencies* (Badan Penilaian Amerika) dalam menentukan layak tidaknya obligasi pemerintah sebagai jaminan dan standar biasanya adalah A-. Namun dalam kasus krisis, ECB menurunkannya menjadi BBB+, dimana Yunani masih meragukan untuk memenuhi kriteria ini. Aset-aset Yunani didominasi oleh aset-aset *illiquid* (cair) sehingga ECB ragu-ragu untuk membantu Yunani. Padahal, krisis Yunani harus segera dihentikan. Hampir semua ekonom menyetujui bahaya utama yang akan muncul dari krisis Yunani

ini, yaitu *contagion effect* (efek domino atau penyebaran) nya terhadap negara-negara lain di *Eurozone* (Zona Eropa). Krisis Yunani dapat mempengaruhi pasar obligasi yang dapat berdampak pada sektor perbankan di *Eurozone* (Zona Eropa). Banyak bank yang telah memulai proses *recovery* (perbaikan) dari krisis finansial tahun 2008 dengan cara meminjam dana dari bank sentral dengan tingkat bunga yang sangat rendah dan investasi pada obligasi pemerintah jangka panjang. Maka bila krisis Yunani mempengaruhi pasar obligasi, nilai obligasi pemerintah akan menurun dan berdampak pada kerugian perbankan yang berpotensi menimbulkan krisis perbankan di *Eurozone* (Zona Eropa).

4.3 Perkembangan Perekonomian Yunani Setelah Mendapatkan Bantuan Dari Uni Eropa

Dalam menerapkan Program Penghematan Ekonomi untuk krisis ekonomi Yunani, Yunani mendapat bantuan teknis dan pengawasan dari *European Commission* (Komisi Eropa), Negara Anggota Uni Eropa, IMF serta ECB . Bantuan teknis yang diberikan Uni Eropa berfokus pada beberapa area yang sangat krusial bagi kesuksesan penerapannya EAP sebagai *Economic Adjustment Programmed* dan EFSF sebagai *Second Economic Adjustment Programme* seperti administrasi pajak dan usaha pemberantasan praktik pemangkiran pajak, manajemen finansial publik, serta reformasi administrasi publik, termasuk di dalam-dalamnya strategi-strategi untuk memperbaiki iklim bisnis. Melalui pemberian saran yang berasal dari praktik nyata, bantuan teknik yang diberikan Uni Eropa berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam

menerapkan EAP dan EFSF. Selain itu, bantuan teknis yang diberikan juga untuk mendukung *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) sendiri melalui bertukar pikiran dan pilihan kebijakan antara pemerintah Uni Eropa dan pemberi bantuan, yang dalam hal ini adalah Uni Eropa. Bantuan teknis yang diberikan oleh Uni Eropa bermanfaat di beberapa area, seperti statistika, penyerapan dana struktural, registrasi tanah, atau perpajakan. Selain itu, bantuan teknis lain yang diberikan oleh Uni Eropa adalah penyediaan ahli dalam bidang privatisasi, kesehatan dan jaminan sosial, reformasi badan usaha milik negara, reformasi manajemen fiskal, dan reformasi pajak, khususnya terkait teknik pengauditan.

Bantuan pengawasan dilakukan untuk mengukur pemenuhan prasyarat yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan dari EAP yaitu untuk menjaga stabilitas fiskal, melindungi stabilitas sistem finansial, dan mendorong pertumbuhan yang potensial dan daya saing. Selain itu, bantuan pengawasan juga berfungsi sebagai fasilitas untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi untuk menerapkan kebijakan dan mencari solusinya, serta terus memeperbaharui informasi pihak pemberi bantuan, dalam hal ini Uni Eropa terkait kondisi yang dihadapi Yunani dan target yang telah dicapai sebagai dasar persyaratan untuk tinjauan program yang akan dilaksanakan berikutnya, sehingga *Memorandum* yang disepakati kedua pihak dapat terus terbaharui. Dalam penerapan *First Economic Adjustment Programme* (Program Pertama Penghematan Ekonomi), pengawasan pertama dilakukan Uni Eropa sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengawasan Uni Eropa dalam *First Economic Adjustment Programme*

Program	Tanggal
Pengawasan Pertama	26 Juli – 5 Agustus 2010
Pengawasan Kedua	15 – 22 Nopember 2010
Pengawasan Ketiga	27 Januari – 11 Februari 2011
Pengawasan Keempat	3 Mei – 2 Juni 2011 dan 21 – 23 Juni 2011
Pengawasan Kelima	21 Agustus – 2 September 2011 dan 11 Oktober 2011
Pengawasan Keenam	5 – 25 Januari 2012
Pengawasan Ketujuh	12 Juni 2012
Pengawasan Kedelapan	22 Desember – 10 Januari 2012/2013

Sumber: *European Commission*

Hasil pengawasan akan dijadikan laporan berkala oleh Uni Eropa dan secara berkala pula pemerintah Yunani akan merevisi *Memorandum of Economic and Financial Policies* (Nota Kebijakan Ekonomi dan Keuangan). Hasil laporan akan dikoordinasikan ke *European Commission* (Komisi Eropa), *Eurogroup*, dan ECB. Bantuan teknis dan pengawasan yang diberikan oleh Uni Eropa juga untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam penerapan *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi).

a. Perbaikan Pada Sistem Perpajakan

Hasil lain yang bisa diukur secara *tangible* (nyata) dari penerapan *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi) adalah perbaikan pada sistem pajak untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Dengan hukum yang

lebih ketat mengatur tentang penghindaran pajak, pada akhir tahun 2010, pemerintah Yunani berhasil mendapatkan 3,4 milyar *euro* dari denda pajak, meningkat 182% jika dibandingkan dengan tahun 2009, serta menyita 555 *yacht* (kapal pesiar) dan mendapatkan 10 juta *euro* dari penalti atas pelanggaran aset yang tidak dilaporkan.

b. Berkurangnya Imigran

Keberadaan imigran, khususnya imigran gelap, selalu menjadi salah satu masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah Yunani. Setelah adanya *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi), diindikasikan bahwa jumlah migrasi ke Yunani berkurang dan terjadi eksodus signifikan dari imigran yang sudah ada di Yunani.

Dalam *survey* (penijauan) yang dilakukan oleh OECD, pada kuartil keempat tahun 2010, terjadi penurunan jumlah imigran yang berada di Yunani sebanyak 4% jika dibanding tahun 2009. Jumlah imigran yang berasal dari Negara non-anggota Uni Eropa yang memiliki izin tinggal di Yunani pada akhir tahun 2010 mencapai 567.000 jiwa, pada akhir tahun 2011 berkurang menjadi 100.000 jiwa. Imigran yang berasal dari negara non-anggota Uni Eropa yang ada di Yunani rata-rata berasal dari Albania, Ukraina, Georgia, dan Pakistan, sedangkan imigran yang berasal dari negara anggota Uni Eropa rata-rata berasal dari Romania dan Bulgaria. Berkurangnya jumlah imigran di Yunani disebabkan berkurangnya jumlah lapangan kerja akibat keadaan ekonomi yang sulit dan adanya pemangkasan sumber daya manusia, khususnya di sektor lapangan kerja yang

banyak memperkerjakan imigran, seperti sektor konstruksi. Lapisan masyarakat yang cukup mendominasi tingkat pengangguran di Yunani sebenarnya adalah imigran.

c. Perbaikan Iklim Ekonomi

Di bawah tekanan pengawasan Uni Eropa dalam penerapannya *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi), Yunani dituntut untuk mereformasi sistem perekonomiannya. Reformasi yang dilakukan berhasil membuat perekonomian Yunani semakin kompetitif untuk menarik investasi asing di segala sektor. Permintaan akan ekspor juga mulai meningkat akibat reformasi sektor industri dan non-industri. Permintaan akan ekspor Yunani semakin memburuk pada awal tahun 2009 akibat krisis finansial global, namun semenjak pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor melalui penerapan *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi).

Selain itu, terjadi peningkatan jumlah kegiatan wirausaha yang dilakukan masyarakat Yunani sebagai solusi untuk mendapatkan penghasilan setelah terjadi pemangkasan dalam jumlah besar pada pegawai sektor publik. Pada pertengahan tahun 2011 banyak usaha bisnis baru berdiri, dan kebanyakan usaha bisnis tersebut dimiliki oleh orang muda.

Hal ini bisa dikatakan sebagai refleksi dari ideologi neoliberal, dimana peran sektor swasta akan menghilangkan peran sektor publik. Untuk mendukung investasi dan kegiatan wiraswasta, pemerintah Yunani membuat peraturan dalam

pendirian usaha menjadi lebih efisien, sehingga lebih mudah bagi pelaku bisnis asing dan domestik untuk memulai bisnis. Administrasi suatu kegiatan usaha dapat dilakukan dalam waktu lebih cepat di bawah sistem baru yang mengatur pengurangan mekanisme pemberian izin pendirian usaha. Apabila di tahun 2009 Yunani berada di peringkat 109 untuk kategori kemudahan melakukan bisnis, pada tahun 2010, Yunani naik peringkat ke peringkat 79. Karena adanya *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi), pemerintah Yunani berusaha menderegulasi pasar supaya lebih *business-friendly* (bisnis yang ramah). Liberalisasi ekonomi Yunani melalui penerapan EAP sangat sesuai dengan cita-cita neoliberalis yang proliberalisasi.

4.4 Analisa Peranan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani

Uni Eropa atau *European Union* (EU) sebagai Organisasi Internasional yang menangani bantuan pangan telah melakukan peranannya dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani melalui program-program krisis ekonomi Yunani yang diawali denga *First Economic Adjustment Programme* (EAP), *Second Economic Adjustment Programme* serta *The Stability and Growth Pact*. Upaya yang dilakukan Uni Eropa sesuai dengan tujuan dan fungi utama Uni Eropa yaitu Untuk mencegah konflik, Mengintegrasikan anggota-anggotanya dalam satu wadah kebijakan bersama serta memperbaiki taraf hidup negara yang dalam kategori perekonomiannya rendah di kawasan Eropa. Namun dalam kondisi saat ini yang melanda zona eropa, krisis ekonomi merupakan sebuah bencana yang sangat besar dan dapat berdampak pada setiap kawasan dikarenakan integrasi dan kebijakan

bersama dalam penggunaan mata uang tunggal *euro*. Dalam hal ini Uni Eropa, Bank Sentral Eropa serta IMF telah membentuk sebuah kesepakatan bersama berdasarkan *Memorandum of Economic and Financial Policies,* sebagai upaya kesepakatan untuk mengatasi krisis ekonomi Yunani melalui program-programnya, salah satunya ialah *First Economic Adjustment Programme* dan dilanjutkan kembali pada tahapan berikutnya melalui *Second Economic Adjustment Programme* serta *The Stability and Growth Pact* yang dibawah kebijakan moneter dan fiskal *European Central Bank* (ECB).

Dalam tiga kategori peranan zang didefinisikan oleh Perwita dan Yani dalam Bab II, maka Uni Eropa atau *European Union* (EU) sebagai Organisasi Internasional (*Intergovernmental Organizations*-IGO) dapat dikatakan sebagai:

1. Instrumen, Uni Eropa digunakan untuk membantu pemerintah Yunani dalam mengatasi permasalahan krisis ekonomi, Dalam hal mengatasi Krisis Ekonomi Yunani, Uni Eropa juga lebih banyak mengambil peran dibanding pemerintah Yunani. Pemerintah Yunani secara tidak langsung menjadi instrumen untuk menerapkan kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa, yang tertuang dalam *First Economic Adjustment Programme* dan dilanjutkan kembali pada tahapan berikutnya melalui *Second Economic Adjustment Programme* serta *The Stability and Growth Pact* yang dibawah kebijakan moneter dan fiskal *European Central Bank* (ECB).

   Ada beberapa alasan di balik kegigihan pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam menerapkan program-program Uni Eropa. Salah satunya adalah konsistensi dengan agenda neoliberal yang mengatur bahwa fungsi pasar

tanpa adanya intervensi dari negara akan menjadi lebih baik. Program-program untuk mengatasi krisis ekonomi Yunani yang diterapkan sesuai dengan unsur-unsur yang didukung oleh perspektif neoliberalisme, yaitu pro-liberalisasi, pro-efisiensi, dan pro-privatisasi. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi Krisis Ekonomi.

2. Arena, Yunani sebagai anggota Uni Eropa atau *European Union* (EU) menjadikan Organisasi Internasional tersebut sebagi tempat atau wadah untuk membicarakan dan menggalang kerjasama mengenai permasalahan Krisis Ekonomi, Ketergantungan pada institusi internasional liberal yang pro-liberalisasi, pro-efisiensi, dan pro-privatisasi ini adalah hal yang ingin dicapai oleh para neoliberalis dan hal ini terlihat jelas sekali pada penerapan *First Economic Adjustment Programme* dan dilanjutkan kembali pada tahapan berikutnya melalui *Second Economic Adjustment Programme* serta *The Stability and Growth Pact* yang dibawah kebijakan moneter dan fiskal *European Central Bank* (ECB) sebagai bentuk interaksi antara pemerintah Yunani dan Uni Eropa dalam mengatasi Krisis Ekonomi Yunani. Ketergantungan pada instrumen neoliberal inilah yang membuat negara pada akhirnya hanya akan terjebak pada lingkaran neoliberal.
3. Aktor independen, dalam menjalankan fungsinya maka Negara-negara anggota Uni Eropa atau *European Union* (EU) adalah aktor independen yang bekerjasama untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan melakukannya tanpa adanya pengaruh dari pihak diluar Uni Eropa atau *European Union* (EU) kecuali IMF sebagai Bantuan Internasional.

Uni Eropa yang memiliki tanggung jawab dalam masalah moneter negara zona *euro* serta adanya bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh ECB, IMF dan Uni Eropa melalui *Economic Adjustment Programme* (Program Penghematan Ekonomi), *The European Financial Stability Facility* dan *The Stability and Grow Pact* yang merupakan bentuk program Uni Eropa yang diterapkan untuk perekonomian yunani. Alasan kenapa Uni Eropa dan lembaga lainnya memilih untuk tidak membiarkan Yunani sebagai akar krisis ekonomi zona Eropa bangkrut adalah karena mereka telah terlibat jauh dan banyak lembaga keuangan Eropa turut menggelontorkan dananya. Jika Yunani tidak diselamatkan maka akan terjadi reaksi berantai dan turut meruntuhkan negara-negara lainnya di kawasan.

.